

Dampak Keterlibatan *United Nations Women Peacekeepers* pada Konflik di Darfur, Sudan (Periode 2013-2016)

Faradiba¹

Anggun Puspitasari²

Abstract

This research is conducted to analyze the Impact of United Nations Women Peacekeepers' involvement in the conflict in Darfur, Sudan (period 2013-2016), In analyzing the case, the researcher applies Post-Feminism theories and Conflict Resolution concept. This research is a qualitative research. This research is also supported by the result of an interview with informant from Reseacher of Imparsial (the Indonesian Human Rights Monitor) as organization of Indonesian society. The result of this research indicates that the involvement of women peacekeepers give a positive impact for the sustainability of women and children of Darfurian due to the various violations of human rights they face. According to Post-Feminism theory gender mainstreaming can be proved by the involvement of women in the Conflict Resolution process in the area of armed conflict although the amount of women still needs to be improved.

Keywords: *Darfur, sudan government, UNAMID, Women Peacekeepers*

Pendahuluan

Konflik yang terjadi di Darfur, sebuah wilayah yang terletak di bagian barat Republik Sudan berupa kekerasan, perpecahan etnis, politik dan krisis ekonomi disebabkan oleh pemerintahan pusat yang lemah, kurang berkembang dan kurang terstrukturnya keterlibatan politik di wilayah tersebut. Konflik yang terus-menerus terjadi mengakibatkan pembunuhan secara besar-besaran. Pada awal tahun 2003 terjadi serangan udara dari pasukan milisi Janjaweed yang bersekutu dengan Pemerintah Sudan telah menewaskan lebih dari 70.000 orang dan jutaan orang mengungsi secara internal dan internasional (Africa Book Programme, (2004). Berbagai tindakan kekerasan terjadi seperti pembunuhan, pemerkosaan, pelecehan, pembakaran dan penjarahan desa di Darfur. Situasi krisis ini mendapatkan perhatian khusus dari dunia internasional yang berperan

¹ Mahasiswi S1 Program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur. Email: frdb.engelen@yahoo.co.id

² Dosen Tetap Program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur.

Dampak Keterlibatan United Nations Women Peacekeepers pada Konflik di Darfur, Sudan

dalam memberikan bantuan sosial dari berbagai entitas negara dan organisasi internasional, terutama peran dari PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). PBB menyebutkan situasi yang terjadi di Darfur sebagai "Krisis kemanusiaan terburuk di Dunia" (Thomson Reuters Foundation, 2014).

Pada tanggal 31 Juli 2007 Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi 1769 yang memberi wewenang pembentukan UNAMID (*United Nations African Union Hybrid Mission in Darfur-Sudan*). UNAMID memiliki mandat inti untuk melindungi warga sipil, memberikan kontribusi terhadap keamanan untuk kemanusiaan, memantau dan melakukan verifikasi pelaksanaan kesepakatan, membantu proses politik secara inklusif, meningkatkan kepedulian terhadap hak asasi manusia dan peraturan perundangan serta memantau dan melaporkan situasi di Darfur (Marina Caparini, et.al., 2015:9). Dalam pelaksanaannya UNAMID memberi wewenang kepada *United Nations Peacekeeping Forces* untuk menjalankan misi sebagai penjaga perdamaian pada konflik yang terjadi di Darfur, Sudan.

Konflik bersenjata yang terjadi di Darfur Sudan banyak memakan korban dari warga sipil terutama dikalangan perempuan dan anak-anak. Hal ini menjadi perhatian khusus Dewan Keamanan PBB untuk menerapkan isi dari ketiga resolusi tersebut. Dengan diawali oleh Resolusi Dewan Keamanan 1325 tahun 2000 yang menyerukan kepada semua aktor untuk melindungi hak-hak perempuan, memperhitungkan kebutuhan dan prioritas perempuan, dan untuk melibatkan perempuan dalam proses membangun perdamaian dan keamanan melalui partisipasi mereka (Sahana Dharmapuri, 2013:2). Partisipasi yang dimaksud juga dalam bentuk peningkatan jumlah wanita berseragam yang bertugas dalam operasi PBB dan penggabungan perspektif gender sebagai *Women Peacekeepers* atau Pasukan Penjaga Perdamaian Perempuan PBB.

Keterlibatan perempuan sebagai *Women Peacekeepers* mengalami perdebatan dan berbagai pertanyaan mengenai keberadaannya yang memainkan peran penting di negara konflik atau sebaliknya. Beberapa berpendapat bahwa sektor keamanan adalah tugas laki-laki bukan untuk perempuan karena mereka secara fisik lebih kuat dan kompeten terhadap tugasnya di negara konflik (Lesley J. Pruitt, 2016:6). Namun disisi lain keberadaan *Women Peacekeepers* dapat dengan mudah melakukan pendekatan dengan mereka karena dibanyak budaya dan masyarakat, wanita tidak bersedia bersifat lebih terbuka kepada laki-laki mengenai kebutuhan dan masalah pribadi. Selain itu, adanya *Women Peacekeepers* cenderung mengurangi tindakan pelecehan dan kekerasan terhadap wanita di negara konflik.

Pada pelaksanaannya jumlah *Women Peacekeepers* belum sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan *International Journal of Humanities and Social Science* menunjukkan bahwa hanya ada 1% personil militer perempuan yang ditempatkan dalam operasi internasional pada tahun 2004, Pada tahun 2010 terjadi peningkatan 7% dan di militer menjadi 2%. Pada tahun 2012 hingga 2015 peningkatan tidak terlalu signifikan hanya kurang dari 10% pasukan penjaga perdamaian dan 3% di bidang militer (Bishwambhar Ghimire, 2017:208). Meskipun Resolusi Dewan Keamanan 1325 tahun 2000 menjelaskan diperlukan adanya keterlibatan perempuan untuk ikut serta menjaga perdamaian dunia, fokus dari resolusi ini bukanlah untuk menyamaratakan porsi laki-laki dan perempuan sebagai *UN Peacekeeping Forces*. Namun tidak mengurangi upaya PBB dalam meningkatkan *Women Peacekeepers* dari segi kualitas diangkat bersenjata, tim mediasi, dan aparaturnya penjaga perdamaian PBB dengan target 20%.

PBB sebagai organisasi internasional memberikan perhatian khusus pada situasi ini dengan menurunkan langsung *Women Peacekeepers* yang dilatih khusus untuk

menghadapi situasi di negara konflik sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tahun 2000. Namun keberadaan *Women Peacekeepers* mengalami pro dan kontra dari berbagai pihak, kebanyakan beranggapan perempuan tidak memiliki kemampuan kompeten untuk berada di situasi konflik dan sektor keamanan bukanlah lingkup yang pantas bagi perempuan. Selain itu, tingkat partisipasi *Women Peacekeepers* terbilang sangat rendah dan masih jauh dari target yang diharapkan oleh PBB. Dari pemaparan tersebut, penulis mencoba merumuskan sebuah rumusan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Dampak Keterlibatan *United Nations Women Peacekeepers* pada Konflik di Darfur, Sudan (periode 2013- 2016)?

Kerangka Pemikiran

Situasi konflik yang terjadi di Darfur merupakan ancaman bagi perempuan dan anak-anak sebagai yang paling mudah menjadi korban kekerasan, sehingga diperlukan adanya peran dari organisasi internasional untuk menangani permasalahan ini seperti PBB (Perserikatan Bangsa- Bangsa). PBB sebagai aktor yang memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian di Darfur terutama keterlibatan *UN Women Peacekeepers*. Berdasarkan studi literatur yang dilakukan peneliti sebagai kerangka pemikiran yang akan dijadikan acuan, konsep dan teori yang digunakan dalam masalah yang terjadi pada konflik Darfur serta keterlibatannya dengan *Women Peacekeepers* yaitu Post-feminisme dan *Conflict Resolution* (Resolusi Konflik) untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Teori Post-Feminism

Postfeminisme menurut *Ann Brooks* yaitu:

"a conceptual frame of reference encompassing the intersection of feminism with a number of anti-foundationalist movements representing feminism 'coming of age', its maturity into a confident body of theory and politics, representing pluralism and difference and reflecting on its position in relation to other philosophical and political movements similarly demanding change"(Ann Brooks, 1997:1)

Menurut Brooks, post-feminisme tidak membantahkan gerakan-gerakan feminisme sebelumnya tetapi lebih memperbaikinya sesuai dengan perkembangan yang terjadi diberbagai bidang. Post-feminisme memiliki sifat yang lebih terbuka terhadap perubahan dengan dipengaruhi teori dan gerakan anti- fundalis yang mengakui kemajemukan dan perbedaan. Adanya sifat yang berorientasi pada post- feminisme membuat perempuan cenderung berupaya lebih mandiri, merasa perannya tidak kalah penting dengan laki-laki sehingga pekerjaan atau keluarga bukan lagi pekerjaan yang harus dipilih. Sifat post-feminisme tersebut merupakan bagian dari strategi pengarusutamaan gender, pengarusutamaan ini memastikan bahwa perspektif gender sangat penting untuk berpartisipasi dalam semua tingkatan pekerjaan seperti penelitian, legislasi, pengembangan kebijakan, dan kegiatan di lapangan (UN Women Official Site, 2017).

Konsep Resolusi Konflik (Conflict Resolution)

Menurut *George Simmel* resolusi konflik merupakan upaya penyelesaian masalah dalam suatu perubahan politik, sosial, budaya dan ekonomi dengan memperhitungkan kebutuhan dari masing- masing pihak yang terlibat (George Simmel, 1955:15). Menurut *John Galtung* bahwa dalam mencegah atau mengatur suatu konflik dapat dilakukan dengan menemukan metode atau cara menegosiasikan perbedaan kepentingan dan menyepakati aturan main untuk berkonflik melalui tiga proses yaitu *peace-making*,

peacekeeping, dan *peace-building* (Tom Woodhouse, 2015:20).

1. *Peace-making*, proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi melalui mediasi, negosiasi, arbitrase terutama pada level elit atau pemimpin.
2. *Peacekeeping* atau operasi keamanan adalah proses penjagaan keamanan dengan penegakan masing-masing pihak terhadap perjanjian dan berusaha untuk selalu menjaganya sebagai sebuah perisai dalam penyelesaian konflik melalui intervensi pasukan bersenjata militer sebagai upaya meredam konflik yang terjadi dan melakukan penjagaan perdamaian yang bersikap netral.
3. *Peace-building* adalah suatu proses implementasi dari perubahan untuk mengembalikan keadaan destruktif akibat kekerasan yang terjadi dalam konflik dengan cara membangun jembatan komunikasi antara pihak yang terlibat konflik agar tercipta suatu perdamaian.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana peneliti berupaya menjawab pertanyaan "Bagaimana?" (Mochtar Mas'ood, 1990:262). Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini data primer yang merupakan hasil dari wawancara dengan seorang peneliti dan juga aktivis yang bergerak dibidang Hak Asasi Manusia dari Organisasi Masyarakat Imparsial dan data sekunder yang bersumber jurna-jurnal dan laporan dari website resmi PBB www.un.org www.unamid.unmissions.org dan buku- buku yang berkaitan dengan penelitian yang kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan berasal dari studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap literatur-literatur yang dilakukan dengan kategorisasi dan klarifikasi bahan- bahan yang terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

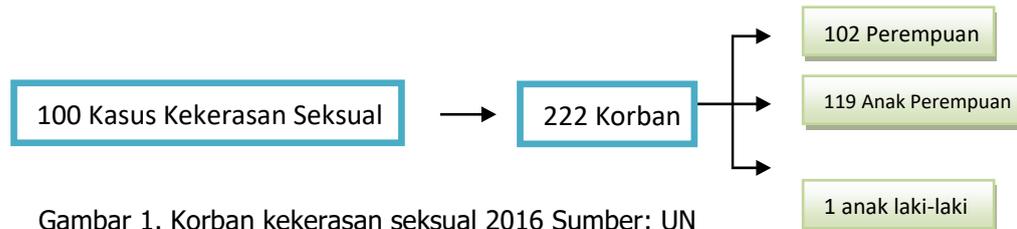
Pembahasan

Darfur merupakan wilayah yang terletak di Sudan bagian barat, diwilayah ini terdapat sekitar 36 suku etnis yang terdiri dari dua kelompok utama, orang Arab dan non-Arab yang terakhir dikenal sebagai "orang kulit hitam" (Global Security, 2015). Dari berbagai suku di Darfur seluruhnya bekerja sebagai petani dan penggembala unta serta sapi dimana suku yang mayoritas bekerja sebagai petani adalah suku Fur dan Massaleit, sedangkan suku yang bekerja sebagai penggembala adalah suku Zaghawa, Baggara, dan Abbala. Dikarenakan pekerjaannya mengandalkan sumber daya alam yang memadai maka suku-suku ini harus berupaya berbagi air dan tanah dalam situasi iklim yang buruk, terlebih diawal tahun 1980 terjadi kekeringan, hasil panen yang rendah, curah hujan tidak menentu, dan banyaknya penyebaran hama yang menyebabkan suku-suku di Darfur mengalami bentrokan dikarenakan kebutuhannya akan sumber daya alam dan diperkeruh dengan kurangnya tata kelola pemerintahan yang baik (Reuters AlertNet, 2007).

Berawal pada tahun 1987 konflik terlihat antara suku Fur dan Nomaden Arab, ketika nomaden Arab semakin mengelompokkan diri mereka sebagai "orang arab" dan selama masa perang ini suku Arab mengelompokkan diri mereka sebagai milisi Janjaweed (*evil man on horseback*) (Human Right Watch, 2004). Milisi Janjaweed semakin memperkuat kekuasaannya sebab Pemerintah Sudan memberikan persenjataan dan kuda untuk menyerang suku Fur dan suku non-Arab lainnya. Keberpihakan pemerintah Sudan

dengan milisi Janjaweed disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya sebagai upaya memperbanyak pasukan tentara Sudan terlihat dari pemberian pasokan persenjataan, alat komunikasi, artileri, dan penasihat militer dari pemerintah Sudan.

Konflik terus terjadi selama bertahun-tahun, milisi Janjaweed melakukan serangan darat dan udara yang menimbulkan berbagai kerusakan dan banyaknya korban jiwa. Kehilangan tempat tinggal yang dibakar membuat warga darfurian tinggal di kamp-kamp pengungsian, pembunuhan besar-besaran dan juga pemerkosaan terhadap perempuan dan anak-anak. Menurut laporan Sekretaris Jenderal PBB pada Januari hingga Desember 2016, mengenai kekerasan seksual terkait konflik Darfur tidak ada satu haripun tanpa laporan mengenai pelecehan seksual terhadap perempuan sebagai berikut:



Gambar 1. Korban kekerasan seksual 2016 Sumber: UN Women Report, 2016, diolah oleh penulis.

Apabila dalam konflik ini perempuan terus-menerus menjadi korban kejahatan, anak-anak semakin sulit untuk bertahan hidup dimana mereka mengandalkan peran orangtua dalam kehidupan. Perempuan memiliki peran yang krusial terutama dalam konflik di Darfur, apabila keberadaannya semakin sedikit maka proses regenerasi warga darfurian semakin sulit. Dampaknya akan mengurangi populasi warga darfurian, tentunya menguntungkan bagi milisi Arab dan pemerintah Sudan untuk membumi hanguskan keberadaan darfurian. Maka kejahatan ini tidak dapat terus-menerus dibiarkan, dibutuhkan peran yang relevan dan mampu menghadirkan perubahan bagi kehidupan warga darfurian.

Proses Rekonsiliasi

Proses rekonsiliasi merupakan upaya yang dilakukan antara pihak-pihak yang mengalami konflik untuk mendukung adanya kestabilan, seperti upaya yang dilakukan PBB untuk mengintensifkan perdamaian pada konflik di Darfur yaitu membentuk *United Nations Peacekeeping Forces Operation* atas rekomendasi Sekretaris Jenderal PBB.³

- *the United Nations Advance Mission in the Sudan* (UNAMIS) berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan 1547 (2004)
- *United National Mission in Sudan* (UNMIS) berdasarkan *Comprehensive Peace Agreement* dan Resolusi Dewan Keamanan 1590 (2005) pada 24 Maret 2005 (UNMIS Official Site, 2017).
- *United nations-African Union Hybrid Operation in Darfur* (UNAMID) secara resmi ditetapkan oleh Dewan Keamanan pada tanggal 31 Juli 2007 melalui Resolusi Dewan Keamanan 1769 tahun 2007 dan misinya masih berjalan hingga saat ini. (Sudan Consortium, 2008)

Keberadaan *Peacekeeping Forces* pada kondisi yang tidak stabil di Darfur selama

³ *United Nations Peacekeeping Forces* secara teknik dibentuk sebagai upaya menciptakan perdamaian yang abadi, membantu menerapkan perjanjian perdamaian antara pihak yang berkonflik dan bertindak sebagai pihak ketiga yang bersikap netral.

Dampak Keterlibatan United Nations Women Peacekeepers pada Konflik di Darfur, Sudan

bertahun-tahun memberikan dampak positif bagi darfuriannya, meskipun hingga saat ini konflik dan serangan masih terus berlanjut. Darfuriannya beranggapan perlindungan fisik dari UNAMID sangat membantu mereka terutama di lokasi pengungsian.

Operasi yang dijalankan *Peacekeeping Forces* ini juga memiliki keterbatasan dalam melindungi darfuriannya di kamp pengungsian, bukan dalam konteks melindungi dari "tindakan fisik" karena hal ini sudah cukup baik dilakukan. Akan tetapi para personel di anggap tidak dapat berinteraksi dengan baik pada warga di kamp pengungsi, beberapa diantara mereka menilai *Peacekeeping Forces* terlalu kaku dan tidak dapat berkomunikasi baik terutama pada perempuan dan anak-anak (Lucy Hovil & Olivia Bueno, 2016:21). Sementara warga darfuriannya yang merupakan korban dari konflik dan kekejaman milisi Janjaweed yang sebagian besar perempuan dan anak-anak ini sangat memerlukan peran perempuan sebagai *Women Peacekeeper* yang dapat mengurangi penderitaan mereka selama di kamp-kamp pengungsian dan membantu mengatasi *trauma healing*.

UN Women Peacekeepers pada pelaksanaan UNAMID

Women Peacekeepers menjalankan misi berdasarkan mandat PBB melalui Resolusi Dewan Keamanan 1325 (2000) yang pada dasarnya adalah kerangka kerja yang membahas dampak perang terhadap perempuan, bersamaan dengan peran penting yang harus dimainkan perempuan dalam pengelolaan konflik, resolusi konflik dan perdamaian yang berkelanjutan (Musi Khumalo, 2015). Dengan cara menetapkan peran penting perempuan dalam pencegahan dan penyelesaian konflik, pembangunan perdamaian, dan untuk partisipasi dan ketertiban yang setara dalam tingkat pengambilan keputusan pada penyelesaian suatu konflik. Beserta tugas utamanya sebagai pemelihara perdamaian, mempromosikan perdamaian, dan keamanan internasional.

UNAMID memperbanyak jumlah petugas polisi perempuan dalam operasi di lapangan sejumlah 300 petugas yang mewakili 91 negara (Meetings coverage and Press Releases, 2009). Mereka melakukan berbagai peran dan bekerja di semua bagian di Darfur, berpatroli di desa dan kamp, memberi rasa aman dan melindungi korban kekerasan seksual, membangun kepercayaan di antara warga Darfur, berinteraksi dengan perempuan dan anak-anak dengan intensitas kedekatan yang tidak dapat dilakukan oleh personel laki-laki.

Implementasi Resolusi Dewan Keamanan 1325 Tahun 2000

Resolusi 1325 (2000) merupakan suatu kemajuan baik yang penting bagi Post-feminism, menurut Post-feminism terlibatnya perspektif gender pada konflik bersenjata menunjukkan bahwa peran perempuan tidak kalah penting dengan laki-laki. Perempuan dapat memiliki akses pekerjaan yang sama dengan laki-laki untuk menyelesaikan permasalahan yang sama, tidak dianggap sebagai makhluk sosial yang hanya dapat melakukan pekerjaan rumah. Meskipun keberadaannya belum dapat dibandingkan dengan banyaknya jumlah *UN Peacekeeping Forces* laki-laki, upaya PBB untuk meningkatkan jumlah *UN Women Peacekeepers* masih jauh dari yang diharapkan. Hanya ada sedikit perubahan dari setiap tahunnya seperti yang terlihat pada grafik berikut ini:



Grafik 1. Jumlah UN Peacekeeping Forces berdasarkan gender tahun 2006-2016 Sumber: Global Peace Operation Review, 2017.

16 negara dari 193 negara anggota PBB yang menjalankan utusan PBB mengenai Resolusi 1325 untuk berpartisipasi membentuk *UN Women Peacekeepers* (UN Official Site, 2013). Jumlah tersebut jauh dari yang diharapkan, kendala terdapat pada negara-negara anggota tidak dapat dengan mudah merekrut perempuan. Proses perekrutan yang diskriminatif serta lingkungan kerja yang tidak aman dan penuh resiko menghalangi banyak perempuan untuk bergabung dengan institusi polisi dan militer. Pada sebagian negara, terutama di negara berkembang terdapat budaya di mana perempuan tidak dapat melakukan peran laki-laki atau bahkan sekedar keluar rumah. Sementara untuk menjadi anggota pasukan penjaga perdamaian terlebih dahulu mereka harus dibekali dengan pelatihan khusus dan mengharuskan mereka meninggalkan keluarga (Fitriani, (2016:162). Pelatihan dimaksudkan agar mereka dapat mempelajari bahasa untuk menghindari kesalahpahaman, pelatihan fisik, dan mempelajari perbedaan dalam menangani perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki sesuai dengan kondisi konflik suatu wilayah.

Women Peacekeepers UNAMID membentuk *The Women's Protection Network* yang didirikan untuk menciptakan perlindungan dari dalam kamp pengungsian (UN-AU Mission in Darfur Report, 2014). Program ini terdiri dari pemimpin perempuan dari tiap-tiap kamp dan mewakili desa masing-masing yang dipertemukan untuk mendiskusikan berbagai pandangan mereka mengenai isu-isu perlindungan. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menjadi cara efektif untuk merespon dan mencegah tindakan kekerasan seksual dan pelanggaran ham terhadap perempuan melalui strategi- strategi khusus, tentunya dengan pengawasan dan perlindungan *women peacekeepers*.

Hasil Kajian Resolusi Dewan Keamanan 1325 Tahun 2000

Untuk mengkaji tantangan-tantangan yang dihadapi *Women Peacekeepers* sehubungan dengan pelaksanaan resolusi ini UNAMID dan Pemerintah Negara Bagian Darfur bekerjasama menyelenggarakan pertemuan secara berkala yaitu *Global Open Day* dengan pemimpin-pemimpin perempuan dari kamp-kamp pengungsian Darfur, Pejabat pemerintah negara bagian, Organisasi Masyarakat, Perwakilan PBB, *women*

Dampak Keterlibatan United Nations Women Peacekeepers pada Konflik di Darfur, Sudan

peacekeepers, dan aktivis perempuan dengan pemaparan sebagai berikut:

2013	2014	2015	2016
(+) Kemajuan dalam mengimplementasikan Resolusi 1325	(+) Dukungan atas forum ini yang mendorong perempuan untuk menyuarakan keprihatinannya	(+) Women Peacekeepers telah secara efektif berpartisipasi dalam mekanisme rekonsiliasi, lembaga pembuat keputusan, dan proses perdamaian.	(+) Pembentukan Unit Anti Kekerasan terhadap Perempuan Darfur (<i>The Women's Protection Network</i>)
Rekomendasi			
Diperlukan peningkatan peran UN Women Peacekeepers, terutama di daerah pedesaan	Keterwakilan perempuan yang tidak memadai dalam posisi pengambilan keputusan perlu ditingkatkan	Diperlukan konsistensi dalam melaksanakan Resolusi 1325	Peningkatan representasi perempuan dikabinet pemerintahan
Mendesak lebih banyak perempuan untuk berpartisipasi dalam forum dan lokakarya	Perlunya kehadiran UN Women Peacekeepers yang memadai & penyediaan kegiatan pengembangan diri bagi perempuan Darfuri	Memperkuat kapasitasnya dalam mempromosikan pengarusutamaan gender dan hak-hak perempuan	Diperlukan kegiatan pemberdayaan dan sosialisasi bagi perempuan dengan jumlah women peacekeepers yang memadai

Tabel 1. Hasil Kajian Implementasi Resolusi 1325 (2000) Sumber: UN-AU Mission in Darfur Report, 2013-2016, diolah oleh penulis.

Keterlibatan *women peacekeepers* dari tahun 2013 hingga 2016 efektif dalam menjalankan misinya di Darfur. *Women peacekeepers* memberi dukungan penuh atas kegiatan ini agar pelaksanaan resolusi 1325 (2000) di tahun-tahun berikutnya dapat terlaksana lebih baik lagi. Mereka juga berperan sebagai pihak yang memantau kesepakatan damai, lebih peka terhadap kebutuhan mantan kombatan perempuan, pengungsi perempuan, pelaksanaan bantuan medis dan korban kekerasan dan pelecehan seksual. Meskipun, kehadiran dan peran *women peacekeepers* masih kurang memadai. *Women peacekeepers* di Darfur keberadaannya sangat penting, mereka memiliki potensi yang lebih tinggi dibanding laki-laki dalam memiliki pemahaman yang lebih baik bahwa pekerjaan mereka dapat mempengaruhi penduduk lokal dengan kegiatan yang positif untuk menegaskan hak mereka dan mengambil posisi kepemimpinan non-tradisional yang termasuk sebagai bagian dari sektor keamanan.

Kurangnya keterlibatan UNAMID *women peacekeepers* juga dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini dari tahun 2013 hingga 2016, sebagai berikut:

2013

Military		Police					
<i>Military Expert</i>		<i>Troops</i>		<i>Individual Police</i>		<i>Formed Police Units</i>	
M	F	M	F	M	F	M	F

307	18	13.863	580	1.893	414	2.303	64
-----	----	--------	-----	-------	-----	-------	----

Tabel 2. Gender Statistics by Mission

Sumber: UN Peacekeeping Official Site, 2013, diolah oleh penulis.

2014

Military		Police					
<i>Military Expert</i>		<i>Troops</i>		<i>Individual Police</i>		<i>Formed Police Units</i>	
M	F	M	F	M	F	M	F
211	9	12.057	557	910	297	1.810	18

Tabel 3. Gender Statistics by Mission

Sumber: UN Peacekeeping Official Site, 2014, diolah oleh penulis.

2015

Military		Police					
<i>Military Expert</i>		<i>Troops</i>		<i>Individual Police</i>		<i>Formed Police Units</i>	
M	F	M	F	M	F	M	F
175	7	13.864	539	1.032	265	1.793	32

Tabel 4. Gender Statistics by Mission

Sumber: UN Peacekeeping Official Site, 2015, diolah oleh penulis.

2016

Military		Police					
<i>Military Expert</i>		<i>Troops</i>		<i>Individual Police</i>		<i>Formed Police Units</i>	
M	F	M	F	M	F	M	F
172	9	13.155	462	1.251	234	1.775	36

Tabel 5. Gender Statistics by Mission

Sumber: UN Peacekeeping Official Site, 2016, diolah oleh penulis.

Berdasarkan tabel-tabel diatas, jumlah keberadaan M (*Male*) UNAMID *Peacekeeping Forces* dari tahun 2013 hingga 2016 jauh lebih signifikan dibandingkan dengan jumlah F (*Female*) baik personil Militer maupun Polisi. Mengetahui perannya berdampak positif terhadap konflik di Darfur, seharusnya PBB memberikan ketegasan bagi negara-negara anggota untuk ikut serta dalam merekrut perempuan- perempuan di negaranya sebagai *women peacekeepers*. Bagi kehidupan sekarang ini, perempuan memiliki peran ganda sebagai pekerja dan berkeluarga sudah menjadi hal yang biasa terjadi. Negara- negara anggota PBB dapat membangun suatu tempat pelatihan khusus di negaranya masing- masing, untuk merekrut perempuan menjadi *UN Peacekeeping Forces*.

Seperti halnya negara-negara berkembang yang banyak merekrut perempuan menjadi tenaga kerja wanita kemudian dikirim ke negara tujuan, negara-negara anggota PBB dapat melakukan hal yang sama. Namun mereka diwajibkan memiliki kemampuan- kemampuan khusus yang memadai agar dapat menyesuaikan diri di wilayah konflik. Seperti kemampuan dalam bersenjata, kemampuan medis (khusus bagi dokter atau perawat), kemampuan berbahasa asing, dan kemampuan lainnya yang menjadi syarat khusus dari PBB. Karena menjadi *women peacekeeper* adalah mandat penting PBB yang kehadirannya sebagai anggota "*Peacekeeping*" yang mampu menjadi upaya Resolusi Konflik agar tercipta perdamaian dunia yang abadi.

Kesimpulan

Konflik internal yang berkepanjangan di Darfur antara Pemerintah Sudan yang berafiliasi dengan milisi Janjaweed, berupaya membunuh suku-suku asli Afrika hitam (darfuri). Perebutan sumber daya alam, perebutan lahan, dan kekeringan semakin menyebabkan perpecahan etnis, tindak kekerasan, dan didukung oleh keberpihakan pemerintah Sudan. Berbagai serangan udara, pembunuhan, pembakaran, kekerasan, pemerkosaan ditujukan pada warga sipil perempuan dan anak-anak. Krisis kemanusiaan tersebut membuat organisasi-organisasi internasional melakukan pertolongan kemanusiaan, salah satunya PBB. PBB yang bertujuan menjaga perdamaian dan keamanan internasional ini membentuk misi UNAMID untuk melindungi warga sipil dan menjalankan mandat yang diberikan PBB. Seiring perkembangannya, UNAMID memerlukan peran khusus perempuan sebagai *UN Women Peacekeepers* yang keberadaannya penting bagi warga sipil terutama perempuan dan anak-anak.

Dapat disimpulkan bahwa upaya PBB dalam mengimplementasikan Resolusi Dewan Keamanan 1325 (2000) telah terlaksana dengan baik terlihat dari adanya 964 personil UNAMID *women peacekeepers*. Keberadaan *women peacekeepers* dalam misi UNAMID ini terbukti efektif dalam menangani eskalasi konflik di Darfur dan berperan penting yang mampu menjadi bagian dari pengarusutamaan gender, melindungi perempuan, dan mendorong partisipasi aktif perempuan dalam perdamaian. *Women peacekeepers* juga dapat berinteraksi baik dengan perempuan-perempuan di Darfur, terbukti dari terbentuknya *The Women's Protection Network* untuk mempermudah perempuan darfuri menyuarakan keprihatinan mereka.

Akan tetapi, partisipasi negara-negara anggota PBB dalam merekrut perempuan sangatlah sedikit dan kurangnya pelatihan khusus sebelum ditugaskan kewilayah konflik. Sehingga diperlukan dorongan dari PBB kepada negara-negara anggota PBB, untuk memperbanyak perekrutan perempuan sebagai *women peacekeepers* dan mengadakan pelatihan khusus. Agar di tahun-tahun berikutnya keterlibatan *women peacekeepers* dapat berjalan lebih efektif dan upaya mengimplementasikan Resolusi Dewan Keamanan 1325 (2000) dapat berjalan dengan baik. Meskipun, Resolusi 1325 (2000) tidak mengutamakan 1:1 kuantitas dari keterlibatan pasukan penjaga perdamaian perempuan dan laki-laki seperti strategi pengarusutamaan gender yang ada dengan melibatkan perempuan diberbagai bidang pekerjaan termasuk sebagai *women peacekeepers*. Tentunya dengan pelatihan khusus yang akan meningkatkan kualitas dari *women peacekeepers* dan meningkatkan efektivitas dari keterlibatannya, terutama di Darfur Sudan.

Referensi

- Africa Book Programme. (2004). "Environmental Degradation as a Cause of Conflict in Darfur." http://www.moncamer.ch/DRDC/StudiesAndResearch/Environmental_Degradation.pdf#page=23 diakses pada 30 September 2017
- Brooks, Ann, (1997). *Postfeminism: Feminism, Cultural Theory and Cultural Forms*. London dan New York: Routledge.
- Caparini, Marina, Festus Kofi Aubyn, Olivia Victoria Davies, Meressa K Dessu & Mateja Peter. (2015). "the role of the police in UNAMID." Institute for security studies: 9.
- Darfur women welcome UN report on conflict-related sexual violence. (2017, 7 Mei). "Displaced women in Darfur have commended the recently published UN Report of the Secretary-General on conflict-related sexual violence in 2016." <https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/darfur-women-welcome-un-report-on-conflict-related-sexual-violence> diakses pada 22 November 2017
- Dharmapuri, Sahana. (2013). *Not Just a Numbers Game: Increasing Women's*

- Participation in UN Peacekeeping*. New York: International Peace Institute.
- Fitriani. (2016). "Pre-Deployment training of UN Women Military Peacekeepers: a case study analysis of three Southeast Asian Countries." United Kingdom: Cranfield University: 162.
- Ghimire, Bishwambhar. (2017). "*Contributions and Challenges: Female Participations in UN Peacekeeping Missions*." International Journal of Humanities and Social Science: 208.
- Global Peace Operation Review. (2017). "Women in UN Peace Operations." New York: the Center on International Cooperation: 28.
- Global Security. (2015). "War in Darfur." <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/darfur.htm> diakses pada 23 oktober 2017
- Hovil, Lucy dan Olivia Bueno. (2016). "No one on the earth cares if we survive expect God and sometimes UNAMID. The challenges of peacekeeping in Darfur." International Refugee Rights Initiative: 21.
- Human Right Watch. (2004). "Q&A: Crisis in Darfur." www.hrw.org/english/docs/2004/05/05/darfur8536.htm diakses pada 8 november 2017
- Khumalo, Musi. (Februari 2015). *Voices of Darfur*. https://unamid.unmissions.org/sites/default/files/old_dnn/UNAMID/Voices%20of%20Darfur%20-%20Feb%202015.pdf diakses pada 14 Desember 2017
- Mas'ood, Mochtar. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional. Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES.
- Meetings coverage and Press Releases. (30 september 2009). " Security Council Adopts Text Mandating Peacekeeping Missions to Protect Women, Girls from Sexual Violence in Armed Conflict." <http://www.un.org/press/en/2009/sc9753.doc.htm> diakses pada 14 Desember 2017
- Pruitt, Lesley J. (2016). *The women in blue helmets: Gender, policing, and the UN's first all-female peacekeeping unit*. California: University of California Press.
- Reuters AlertNet. (2007, Juli 2009). "Underground Lake May Bring Darfur peace:scientis." <https://www.reuters.com/article/us-darfur-sudan-water/underground-lake-may-bring-darfur-peace-scientist-idUSN1830279020070718> diakses pada 23 Oktober 2017
- Simmel, George. (1955). *Conflict and the web of group-Affiliations*. New York: The Free Press.
- Sudan Consortium, (2008), "Putting People First: The Protection Challenge Facing UNAMID in Darfur." http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A04FDA0B34B69819C12574950037327E-Full_Report.pdf diakses pada 12 Desember 2017
- Thomson Reuters Foundation. (2014, 31 Juli). "Darfur conflict (struggle for resources)." <http://news.trust.org//spotlight/Darfur-conflict> diakses pada 27 Desember 2017
- UN Official Site, 2013, Women in Peacekeeping a growing force, https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/gender_infographic_3.png diakses pada 11 Desember 2017
- UN Women Official Site. 2017. UN Women Gender Mainstreaming, <http://www.un.org/womenwatch/osagi/gendermainstreaming.htm> diakses pada 27 Desember 2017
- UN-AU Mission in Darfur Report. (2014, 10 November). "Enhancing the Protection of Women and Girls in Darfur." <https://reliefweb.int/report/sudan/darfuri-women-deliberate-unscr-1325> diakses pada 24 Desember 2017
- UNMIS Official Site. 2017. Fact Sheet: Closure of UNMIS, <https://unmis.unmissions.org/> diakses pada 20 November 2017
- Woodhouse, Tom. (2015). *Peacekeeping and International Conflict Resolution*. United Kingdom: University of Bradford.